

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA BERBASIS BAHAN BAKU LOKAL

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.
Menteri Pertanian dan Kehutanan Republik Indonesia

Pendahuluan

Pada masa lalu, pertanian selalu dianggap sebagai upaya sistematis peningkatan produksi dalam subsistem usahatani budidaya pertanian (on-farm agribusiness), baik dilihat dari kacamata pembangunan Pertanian itu sendiri maupun dari pengertian pengembangan ekonomi. Selanjutnya muncul berbagai tantangan yang semakin besar dari berbagai lingkungan baik internal maupun eksternal secara nasional dan internasional yang mengalami perubahan dan bergeser secara mendasar dan menyeluruh, sehingga pandangan di atas sudah saatnya untuk diubah.

Pembangunan pertanian kedepan harus merupakan upaya pengembangan yang utuh dan menyeluruh pada semua aspek ekonomi, yang didalamnya terkait subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir, serta subsistem jasa penunjang agribisnis pertanian. Ini berarti bahwa didalam pembangunan ekonomi nasional mendatang, sektor agribisnis pertanian tidak lagi hanya sekedar ditempatkan sebagai pendukung atau pelengkap.

Secara luas telah diakui, bahwa pertanian merupakan sektor tangguh pendukung pembangunan sektor industri. Pengalaman pada saat krisis ekonomi yang lalu membuktikan, sektor agribisnis pertanian tetap mampu mempunyai peran dan memberikan kontribusinya terhadap devisa negara, keuntungan bagi sepengelola, bertahan terhadap guncangan ekonomi nasional, peningkatan pendapatan petani, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, penyerapan peningkatan pendapatan petani, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, penyerapan tenaga kerja, serta

pertanian barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Bahkan kegiatan agribisnis pertanian ini mampu meraup keuntungan memadai dan menciptakan iklim kondusif yang sangat diperlukan untuk peningkatan perekonomian nasional pada sektor lain.

Sebenarnya, ketangguhan tersebut disebabkan oleh karakteristik dan keunggulan dari agribisnis itu sendiri. Usaha agribisnis umumnya mengutamakan penggunaan bahan baku lokal yang banyak tersedia di dalam negeri dan sesedikit mungkin menggunakan komponen impor. Teknologi dan keterampilan kegiatan agribisnis pertanian pada umumnya dapat dikuasai oleh para pelaku usaha serta dapat dikembangkan secara mudah sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, kalau kita membicarakan tentang perbedayaan ekonomi rakyat, maka yang dimaksud ialah semua upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang menggantungkan hidupnya pada sektor agribisnis. Alasannya ialah karena sebagian besar rakyat menggantungkan hidupnya pada kegiatan agribisnis. Dari penduduk Indonesia yang jumlahnya kini lebih dari 200 juta jiwa, hampir sekitar 80 persen persen menggantungkan hidupnya pada sektor agribisnis, baik pada agribisnis hulu, usahatani segmen on farm, maupun pada agribisnis hilir serta pada kegiatan penyediaan jasa agribisnis. Diperkirakan sekitar 70 persen dari jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan, baik sebagai keluarga petani tanaman pangan, perkebunan rakyat, peternak, nelayan, buruh tani dan sebagainya. Sampai kini mereka masih ada pada tingkat golongan yang berpendapatan rendah. Oleh sebab itu untuk memberdayakan ekonomi rakyat maka yang dapat dilakukan adalah: pertama, mempercepat tingkat kemajuan sektor ekonomi dimana sebagian besar rakyat menggantungkan

hidupnya pada sektor agribisnis. Kedua, ialah dengan memperbesar pangsa pasar manfaat ekonomi yang diterima oleh rakyat dari manfaat ekonomi yang ditimbulkan oleh kemajuan sektor agribisnis.

Dimasa kedepan sektor agribisnis pertanian ini masih tetap menguntungkan, dan akan berkembang lebih pesat dan mampu menghadapi berbagai goncangan perekonomian eksternal, maka peluang dan kesempatan ini perlu terus diantisipasi dan dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik dari sektor pemerintah, swasta sebagai pelaku usaha riil maupun masyarakat luas.

Paradigma pembangunan pertanian akan menuju *"terwujudnya masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pengembangan system agribisnis pertanian dan kehutanan yang berdaya saing, berkelanjutan, berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang lestari sesuai dengan fungsinya"*. Misi pembangunan pertanian dan kehutanan secara ringkas adalah: mengembangkan prasarana dan sarana pertanian dan kehutanan, meningkatkan produksi, produktivitas dan efisiensi, melakukan pengelolaan konservasi sumberdaya alam, mengembangkan agroindustri, mengembangkan system ketahanan pangan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan sistem agribisnis, meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan agribisnis, dan mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang ramah lingkungan dan misi khusus kehutanan lain.

Pilar pertama yang perlu diperkuat ialah penyediaan bibit-bibit pertanian yang tersebar luas sehingga bibit-bibit pertanian tersebut dapat dengan mudah diperoleh dan terjangkau harganya oleh para petani-peternak-pekebun dan pekerja kehutanan di pedesaan.

Pilar kedua ialah penyediaan pupuk, pakan dan obat-obatan pertanian maupun ternak sehingga pupuk, pakan dan obat-obatan pertanian tersebut dapat dengan mudah diperoleh dan terjangkau harganya oleh para petani-perkebunan dan pekerja kehutanan di pedesaan.

Pilar ketiga ialah penerapan teknologi budidaya yang mampu diserap

dengan mudah oleh para petani-peternak-pekebun dan pekerja kehutanan.

Selain ketiga pilar tersebut di atas masih diperlukan pula dukungan kegiatan-kegiatan lain yaitu pengembangan kelembagaan usaha dan keterampilan petani-peternak-pekebun dan pekerja kehutanan, kesehatan lingkungan tanaman dan ternak, peningkatan industri dan pemasaran hasil pertanian, serta pengembangan wilayah pertanian.

Strategi agribisnis pertanian ini secara menyeluruh harus berorientasi pasar, dengan menggerakkan seluruh komponen, mulai dari subsistem sarana-prasarana di hulu, subsistem budidaya, subsistem industri dan pemasaran di hilir termasuk keterkaitannya secara terpadu dengan lembaga-lembaga pendukung lain yang ada diluar Departemen Pertanian dan Kehutanan.

Tugas pokok dan fungsi Departemen Pertanian dan Kehutanan pada masa kedepan akan lebih dititik beratkan pada koordinasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan dari berbagai kebijakan teknis, norma dan standar teknis serta sistem dan prosedur yang menyangkut pilar-pilar pendukung pembangunan pertanian yang saya sebutkan diatas.

Kebijakan Pengembangan Pertanian ini juga harus diselaraskan dengan jiwa otonomi daerah yang dituangkan didalam UU No. 22 tahun 99 tentang Pemerintahan di Daerah berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 25/2000, serta UU No. 25 tahun 99 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan penyesuaian ini diharapkan pengembangan peternakan di daerah dapat lebih meningkatkan dan memanfaatkan potensi spesifik di daerah maupun meningkatkan keterampilan petani untuk memenuhi permintaan pasar.

Perkembangan Agribisnis Peternakan

Subsektor peternakan mempunyai peranan besar dalam kegiatan ekonomi pedesaan. Perkembangan subsektor peternakan selama ini cukup menggembirakan. Apabila dibandingkan keadaan pada tahun 1969 dengan tahun 2000, populasi sapi potong telah meningkat 2 kali dari sekitar 2 juta ekor menjadi sekitar 12 juta ekor.

Populasi sapi perah naik 6 kali dari sekitar 50 ribu ekor menjadi lebih dari 3000 ribu ekor. Populasi kerbau tampak relatif statis sekitar 3 juta ekor. Kambing dan domba meningkat lebih dari 2 kali yaitu 10 juta ekor menjadi sekitar 22 juta ekor. Pertumbuhan ternak yang paling cepat ialah unggas. Populasi ayam buras naik dari 60 juta ekor menjadi 270 juta ekor. Populasi ayam ras pedaging yang pada tahun 1980 hanya sekitar 25 juta ekor telah meningkat lebih dari 30 kali lipat menjadi lebih dari 800 juta ekor tahun 2000; sedangkan ayam ras petelur dari hanya sekitar 0,6 juta ekor, meningkat lebih dari 10 kali menjadi lebih dari 75 juta ekor.

Subsistem agribisnis hulu mempunyai peran yang sangat penting, disini berkaitan dengan penyediaan sarana pertanian dan prasarana pendukung pertanian. Penyediaan sarana pertanian seperti penyediaan bibit dan benih, pupuk, pakan-ternak, obat-obatan untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan. Penyediaan prasarana pertanian meliputi penyediaan fasilitas pendukung pertanian seperti jalan dan jembatan menuju desa-desa produksi, gudang-gudang dan silo-silo untuk menyimpan bahan baku produksi maupun hasil produksi, tempat pelayanan umum pertanian termasuk pos-pos pelayanan peternakan dan holding-ground, permodalan/kredit mudah dan murah dan lain sebagainya.

Perkembangan pola pengusahaan ternak di Indonesia

Dilihat dari pengusahaannya, kegiatan ekonomi berbasis peternakan diselenggarakan oleh dua golongan yaitu peternak rakyat dan perusahaan peternakan. Dapat dikemukakan bahwa untuk ternak sapi perah, ayam buras, domba, kambing dan kerbau, hampir seluruhnya adalah peternakan rakyat.

Pangsa peternakan rakyat untuk komoditi sapi potong pada tahun 1990 mendekati 100 persen, namun pada sepuluh tahun terakhir ini berkembang feedlot-feedlot sapi potong sehingga pangsa peternak rakyat menurun menjadi sekitar 90-95 persen. Ayam ras petelur, pangsa

peternak rakyatnya masih sekitar 80 persen. Ayam ras pedaging, pangsa peternak rakyatnya diperkirakan tidak lebih dari 50 persen. Secara keseluruhan pangsa peternak rakyat menjadi bahwa tulang punggung penyediaan hasil ternak (daging, susu, telur) nasional.

Ditinjau dari tingkat komersial usaha peternakan dapat dikelompokkan kedalam 4 pola usaha yaitu: (1) usaha sampingan, (2) cabang usaha, (3) usaha pokok, dan (4) industri peternakan. Secara spekulatif dapat dikatakan, bahwa usaha ayam buras, kerbau, domba, kambing masuk kedalam pola usaha sambilan dan cabang usaha yang umumnya terintegrasi dengan kegiatan usahatani lain yang ada di pedesaan. Usaha sapi potong, kini mulai terpolarisasi, selain pola usaha sambilan dan cabang usaha para peternak rakyat, juga sebagai pola industri peternakan sapi potong yang dikelola oleh pengusaha yang bergerak dibidang penggemukan sapi potong. Hal sama terjadi pada usahatani ayam ras pedaging dan petelur milik para peternak dipedesaan, kini sudah berkembang menjadi usaha pokok peternakan. Difihak lain usaha ayam ras yang dikelola oleh perusahaan peternakan telah berkembang menjadi suatu industri peternakan yang terintegrasi secara vertikal. Artinya, industri pembibitan ayam ras, industri pakan, budidaya, industri pemotongan ayam, bahkan sampai kepada layanan pakan dan pengobatan yang dimiliki oleh grup perusahaan tertentu.

Hingga sekarang peternak rakyat baru mampu mengelola usaha ayam ras sampai tingkat budidaya ayam ras (on-farm). Sedangkan untuk agribisnis hulu (industri pembibitan, pakan obat-obatan, dll) dan agribisnis hilir (industri pemotongan ayam, pelayanan pakan dan obat-obatan) serta perdagangan dikuasai oleh perusahaan peternakan. Satu-satunya kegiatan agribisnis peternakan dengan pola industri baru ada pada agribisnis sapi perah yang penguasaannya dilakukan oleh peternak bersama koperasi yaitu Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Inipun mereka masih belum mempunyai pabrik maupun jaringan distribusi dan pemasaran produk hasil olahannya sendiri.

Sarana dan Prasarana di dalam Agribisnis Peternakan Hulu

Sistem dan pola pengembangan komoditas dan bibit-bibit peternakan perlu dikembangkan secara benar.

Dibidang bibit ternak, konsep pembibitan peternakan harus benar-benar menjangkau kebutuhan bibit para peternak. Pengalaman masa lalu seringkali konsep pembibitan terlalu mengedepankan teknologi sehingga tidak terjangkau oleh para petani-peternak lapis bawah yang ada di pedesaan. Pembibitan agar mengembangkan pembibitan rakyat dan teknologinya dibantu dengan mengembangkan teknologi terapan yang telah diteliti dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga penelitian dan permodalannya dibantu dengan melalui penyediaan fasilitas permodalan kredit pemerintah maupun kemitraan dengan para pengusaha swasta.

Pembibitan ayam ras pada subsistem agribisnis hulu pihak swasta telah melakukan investasi besar sehingga mampu menghasilkan mendekati satu milyar ayam day old chick setahun, yang mendorong terjadinya investasi besar untuk industri pakan-ternak dan obat-obatan hewan.

Peternakan on Farm

Pada subsistem budidaya peternakan sangat diperlukan pengembangan teknologi yang mudah diserap dan dapat diterapkan oleh peternak. Bertolak dari tingkat teknologi lokal yang dikuasai oleh para peternak agar dikembangkan sedemikian rupa sehingga teknologi yang dikembangkan tersebut dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu identifikasi terhadap potensi tingkat budidaya komoditas, potensi sumberdaya genetik (plasma nutfah) ternak maupun potensi bibit peternakan sangatlah penting untuk dilakukan. Termasuk didalamnya untuk pengembangan sistem dan pola teknologi budidaya, teknologi persilangan oleh unit-unit pembibitan pemerintah, swasta, termasuk oleh masyarakat itu sendiri.

Adanya kecenderungan untuk memaksakan penerapan teknologi maju di pedesaan, seolah hanya dengan tehnik yang

modern saja peternakan dapat dikembangkan. Pengalaman memberitahukan kepada kita, bahwa penerapan teknologi yang terlalu maju, sebagian hanya dapat diserap oleh para petani peternak di pulau Jawa dan hanya sebagian kecil di luar pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena sistem pemeliharaan ternak di luar pulau Jawa masih dilakukan secara ekstensif. Akibatnya timbul kesenjangan sosial antara penduduk yang ada di pulau Jawa dan penduduk diluar Jawa terutama Indonesia bagian Timur yang cenderung mengarah kepada disintegrasi bangsa. Pada kesempatan ini saya menekankan agar para peneliti di lembaga penelitian maupun perguruan tinggi agar menggali sebanyak mungkin teknologi tepat guna yang cocok dengan kondisi untuk mengembangkan pada peternakan rakyat yang ada di luar pulau Jawa.

Penerapan teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan lebih-lebih transfer Embrio misalnya, perlu dikaji ulang apakah relevan jika dilakukan penerapannya keseluruh Indonesia. Di ranch-ranch peternakan yang ada di negara seperti Australia, New Zealand, Amerika Utara dan Amerika Latin, negara-negara Eropa pun, sebagian masih menggunakan sistim perkawinan alam. Mereka tidak memaksakan penerapan inseminasi atau transfer embrio di ranch-ranch produksi, dan hanya pada breeding farm yang menghasilkan bibit-bibit unggul saja.

Perkembangan Pakan dan Bahan Baku Pakan untuk Ternak

Investasi pabrik pakan ternak diperkirakan mencapai dari 25 trilyun rupiah. Omset perdagangan pakan ternak yagn produksinya kini mencapai 5-6 juta ton pakan setahun dapat mempunyai nilai sekitar 10 trilyun rupiah setahun. Namun saya prihatin setelah mencermati data komponen impir pakan termasuk di Indonesia yang sangat tinggi. Setiap tahun kita masih harus mendatangkan sekitar 4-5 juta ton bahan baku impor berupa tepung daging, tepung tulang, tepung bulu, tepung ikan, bungkil kedele, jagung, dedak gandum dan kalsium. Penggunaan bahan baku asal dalam negeri hanya sekitar 30-40 persen, yaitu berupa

tepung ikan, jagung, bekatul, polar. Masih tingginya komponen impor pakan inilah yang menyebabkan pada saat krisis ekonomi yang lalu industri perunggasan sangat terpuruk.

Penyediaan jagung didalam negeri meskipun sangat bergantung kepada musim, namun dari segi budidaya dan produktifitas jagung sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah sehingga jagung mampu kita produksi cukup. Masalahnya timbul akibat kesulitan didalam proses penyimpanan karena tidak cukup tersedia silo-silo tempat penyimpanan jagung. Jagung yang dibutuhkan oleh industri pakan ternak dapat mencapai sekitar 3-3,5 juta ton jagung setahun. Beberapa pabrik pakan besar telah mendirikan silo-silo untuk kebutuhan sendiri, namun kapasitasnya masih terbatas. Kondisi seperti ini cukup rawan, karena pada saat panen persediaannya melimpah menyebabkan harga jatuh, sehingga para pedagang melakukan ekspor jagung ke luar negeri karena lebih menguntungkan. Pada saat paceklik persediaan jagung didalam negeri menipis, harganya naik sehingga para pedagang melakukan impor jagung dengan harga yang tidak murah. Kini sedang dijajaki kemungkinannya pendirian gudang-gudang / silo-silo didaerah sentra produksi jagung, yang biayanya cukup mahal dapat dipikul oleh pemerintah bersama parbik-pabrik pakan.

Peluang ekspor pakan dan bahan baku pakan

Selain impor sebenarnya potensi ekspor bahan baku pakan ternak cukup berpeluang besar. Banyak potensi bahan baku pakan lokal yang belum banyak diolah maupun dipasarkan keluar negeri. Potensi bahan baku pakan tersebut antara lain berupa limbah perkebunan seperti biji-karet, pucuk tebu, dlsb; limbah tanaman pangan seperti gaplek, jerami padi, jerami kedele, jerami jagung maupun palawija lain; limbah industri seperti molases, ampas tebu, dedak-padi, dedak gandum (polar), ampas tahu, bungkil, bungkil kedele, bungkil kelapa sawit, bungkil kelapa, ampas kopi dan kakao, dlsb. Di negara maju bahkan limbah industri pemotongan ayam dan ruminansia

seperti sisa-sisa gading, tulang, bulu, dll. Diproses menjadi bahan baku pakan ternak; produknya berupa meat bone meal, feather meal.

Kondisi tersebut diatas perlu terus digali dan ditumbuh kembangkan agar dapat diperoleh devisa bagi negara yang sebesar-besarnya.

Ekspor ke Australia harus terus diusahakan meskipun hambatan dari pihak karantina Australia cukup besar. Kita harus mampu memecahkan semua permasalahan termasuk persyaratan yang diberikan karantina Australia. Demikian pula ekspor pakan dan bahan baku pakan ke negara-negara Eropa, Amerika dan Asia termasuk ke Jepang, Korea, dll.

Pengembangan Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti identifikasi agroklimat pendukung pertanian, identifikasi sumber daya alam pendukung, komoditas pertanian, hama penyakit pertanian sarana dan prasarana, sosial budaya, teknologi terapan dan kelembagaan pertanian. Konsep-konsep pengembangan kawasan terpadu dapat terus dikembangkan, disesuaikan rencana pengembangan jenis ternak yang cocok pada agroklimat tersebut.

Pengembangan dan Pemberdayaan

Pengembangan dan Pemberdayaan petani-peternak-pekebun dan pekerja kehutanan akan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti identifikasi model-model pembiayaan dan kelembagaan petani-peternak-pekebun dan pekerja kehutanan serta peningkatan kelembagaan usaha pertanian. Analisis potensi petani-peternak-pekebun dan pekerja kehutanan, peningkatan skala usaha dan termasuk Temu usahatani petani-peternak-pekebun dan pekerja kehutanan.

Penutup

Tanpa mengurangi peran otonomi di daerah, strategi agribisnis pertanian berorientasi pasar dilakukan dengan menggerakkan seluruh komponen mulai dari

subsistem sarana-prasarana di hulu, subsistem budidaya, subsistem industri dan pemasaran di hilir termasuk keterkaitannya secara terpadu dengan lembaga-lembaga lain diluar Departemen Pertanian dan Kehutanan.

Untuk mengatasi hasl-hal yang saling tumpang tindih diperlukan saling keterbukaan dan toleransi dengan tetap menjalin keterpaduan dan kerjasama antara sesama unit kerja dan secara bijaksana menetapkan "siapa mengerjakan apa"

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan pada Seminar Nasional menyambut Dies Natalis 31 Tahun Fakultas Peternakan - Universitas Gadjah Mada ini dengan harapan pokok-pokok pikiran dapat dijadikan bahan dalam menyusun rumusan Seminar.

Semoga seminar ini dapat berjalan lancar dan sukses dan dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang bermanfaat bagi pengembangan agribisnis pertanian selanjutnya.